

Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati

Ahmad Mutawakkil Rohman¹, Kamilia Hamidah¹

¹²Institut Mathali'ul Falah

¹mutawakkil76@gmail.com, ²kamiliahamidah@ipmafa.ac.id

OPEN  ACCESS

Dikirim : 18 Oktober 2024
Diterima : 28 Oktober 2024
Terbit : 31 Oktober 2024
Koresponden:
mutawakkil76@gmail.com

Cara sitasi:



Karya ini bekerja di
bawah lisensi Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License
[https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the empowerment of persons with disabilities in Pati Regency. Using a qualitative descriptive approach and field research methods, the study explores how the collaboration between local government, the Indonesian Disability Association (PPDI), and the local community contributes to improving the quality of life and welfare of persons with disabilities. The results show that this collaboration significantly enhances accessibility, productivity, and participation of persons with disabilities in various empowerment programs. However, the involvement of the private sector in collaborative forums remains a challenge that must be addressed to create broader synergy. In conclusion, collaborative governance is an effective approach for creating inclusive policies and empowering persons with disabilities, but

more support from the private sector is needed.

Keywords: *Collaborative governance, disability empowerment, PPDI Pati, inclusive policy, public-private sector.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan metode penelitian lapangan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta komunitas lokal berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, produktivitas, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai program pemberdayaan. Meski demikian, keterlibatan pihak swasta dalam forum kolaboratif masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan sinergi yang lebih luas. Kesimpulannya, *collaborative governance* merupakan pendekatan yang efektif dalam menciptakan kebijakan inklusif dan memberdayakan penyandang disabilitas, namun perlu lebih banyak dukungan dari sektor swasta.

Kata Kunci: *Collaborative governance*, pemberdayaan disabilitas, PPDI Pati, kebijakan inklusif, sektor publik-swasta.

A. PENDAHULUAN

Kompleksitas permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia mengindikasikan bahwa masih banyak hal yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Penanganan masalah disabilitas, misalnya, memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berdampak nyata. Oleh karena itu, keterlibatan sektor publik, privat, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam bingkai kolaboratif atau yang dikenal dengan istilah *collaborative governance* (Hardi, 2020).

Collaborative governance merupakan salah satu strategi tata kelola yang melibatkan kerja sama antara aktor publik dan privat untuk menetapkan aturan dan kebijakan guna memastikan tercapainya tujuan publik secara efektif. Dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Menurut Ansell & Gash (2008), tata kelola kolaboratif melibatkan para pemangku kepentingan dalam penanganan masalah publik, termasuk upaya mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Namun, mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan data yang akurat, analisis yang mendalam, serta keterbatasan dana. Data yang tidak mutakhir sering kali menghambat proses

identifikasi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, yang berdampak pada kebijakan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi kendala dalam menyediakan layanan yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas fisik dan program-program inklusif (Salim & Yulianto, 2021).

Tantangan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas mencakup keterbatasan data akurat, analisis kebutuhan, dan keterbatasan dana. Data yang tidak mutakhir menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran, sementara kurangnya dukungan anggaran menghalangi penyediaan layanan inklusif seperti aksesibilitas fisik dan program khusus. Selain itu, minimnya *political will* dalam mendukung kebijakan inklusif serta masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga menjadi hambatan besar (Salim & Yulianto, 2021)

Sebagai bentuk komitmen negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan payung hukum yang jelas bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menekankan perubahan dari pendekatan bantuan sosial ke pendekatan berbasis hak yang setara. (Undang-Undang, 2016).

Salah satu contoh nyata dari upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui *collaborative governance* adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kabupaten Pati. Berdiri sejak tahun 2017, organisasi ini beranggotakan 243 orang penyandang disabilitas dan beroperasi di bawah binaan Dinas Sosial Kabupaten Pati. PPDI Pati memiliki visi untuk menjadi wadah bagi penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemampuan, meningkatkan kemandirian, serta memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai sektor kehidupan. Melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, PPDI berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberdayakan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pati (Suratno, 2024).

Tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Pati, sering kali menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan dan disabilitas. Disabilitas kerap menjadi penyebab sekaligus dampak dari kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan

penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk memutus siklus ini. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memastikan kesetaraan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial (Amaliah, 2016).

Collaborative governance memastikan bahwa penyandang disabilitas menikmati hak-hak mereka secara penuh. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat seperti PPDI Pati, hambatan dan pembatasan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dapat diminimalisir. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan sosial mereka (Andra & Haryanto, 2023). Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada analisis implementasi *collaborative governance* dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya dengan melihat peran PPDI di Kabupaten Pati sebagai studi kasus untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dapat dioptimalkan.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan secara jelas keadaan serta fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan makna yang dihasilkan oleh kelompok tertentu dalam mengembangkan serta memberdayakan kelompok di sekitarnya (Hadari, 2007). Dalam konteks Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara untuk memahami situasi yang ada, sehingga dapat menggambarkan kondisi dan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan data sesuai dengan masalah yang diteliti tanpa menambah atau menguranginya (Bungin, 2009). Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif, dengan fokus pada pembahasan yang didukung oleh teori. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran yang akurat berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggambarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, serta mengolah data secara deskriptif dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pati

Ansell dan Gash mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008).

Analisis penerapan *collaborative governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati, dengan fokus pada Dinas Sosial dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, dapat dijelaskan berdasarkan kriteria Ansell dan Gash sebagai berikut:

1. Adanya forum yang diinisiasi oleh institusi publik

Dinas Sosial serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati memulai forum diskusi kolaboratif yang melibatkan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kerja sama. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, serta menjadi wadah di mana para pemangku kepentingan, termasuk penyandang disabilitas, dapat berbagi ide, tantangan, dan solusi. Forum ini diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas disabilitas, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.

Hasil wawancara dengan Suwarno (2024), Dinas Sosial berfokus pada integrasi penyandang disabilitas ke dalam masyarakat melalui akses ke program-program sosial yang relevan. Melalui forum ini, diharapkan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dapat diidentifikasi dengan lebih baik, dan program intervensi yang tepat dapat disusun (Suwarno, 2024). Begitu juga dengan hasil wawancara

dengan Yulianto (2024), di sisi lain, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan olahraga dan rekreasi, serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi diri (Yulianto, 2024).

2. Adanya partisipan dalam forum yang mencakup aktor non-pemerintahan

Dalam konteks Kabupaten Pati, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pati memainkan peran penting sebagai aktor non-pemerintah dalam proses kolaboratif ini. Kehadiran PPDI Pati sangat diperlukan untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait pemberdayaan mereka. PPDI berperan sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan pemerintah, serta terlibat dalam pengumpulan data, advokasi, dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pihak swasta masih minim dalam forum-forum yang diadakan. Keterbatasan ini menjadi tantangan dalam menciptakan sinergi yang lebih luas untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas (Wawancara Suwarno). Untuk mengatasi hal ini, perlu ada usaha lebih lanjut dari pemerintah untuk melibatkan sektor swasta secara aktif. PPDI Pati juga terlibat dalam kolaborasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, terutama dalam prakarsa pendirian *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Kabupaten Pati, yang bertujuan mengorganisir pengembangan dan pelatihan atlet disabilitas (Yulianto, 2024).

3. Forum terorganisasi secara formal dan ada pertemuan rutin

Pada kolaborasi antara PPDI Pati dan Dinas Sosial, forum-forum yang dilaksanakan masih kurang terstruktur. Forum sering dijadwalkan secara mendadak dan bersifat kondisional, menyesuaikan situasi dari dinas terkait (Suwarno, 2024). Hal ini menimbulkan

masalah dalam kesinambungan dan efektivitas program pemberdayaan.

Sebaliknya, dalam konteks kerja sama PPDI Pati dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, forum yang diadakan lebih terstruktur melalui NPCI Pati. Forum ini diadakan secara rutin dua kali setahun, dan forum kondisional diadakan menjelang kompetisi olahraga baik di tingkat lokal maupun daerah (Yulianto, 2024). Struktur dan kesinambungan pertemuan ini penting untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

4. Kebijakan yang diambil berdasarkan konsensus

Kebijakan yang diambil dalam kolaborasi antara PPDI Pati dan Dinas Sosial disetujui oleh kedua belah pihak, menunjukkan komitmen bersama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. PPDI Pati memberikan masukan terkait kebutuhan anggotanya dan berperan aktif dalam merancang program-program yang tepat sasaran. Salah satu tugas penting PPDI adalah mensosialisasikan program pemerintah kepada penyandang disabilitas, sehingga informasi dapat diakses dengan baik dan partisipasi mereka dapat dioptimalkan (Suwarno, 2024).

Kerja sama antara PPDI Pati dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata juga menunjukkan proses konsensus yang serupa. Dalam kerja sama ini, PPDI bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan mengorganisir kegiatan yang mendukung pengembangan atlet penyandang disabilitas, sekaligus melakukan advokasi untuk aksesibilitas fasilitas olahraga dan pariwisata (Suratno, 2024).

5. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik

Kolaborasi antara PPDI Pati dan Dinas Sosial Kabupaten Pati berfokus pada pengembangan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan, rehabilitasi, dan manajemen bantuan sosial yang tepat sasaran (Suwarno, 2024). Selain itu, kerja sama PPDI dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata difokuskan pada

pengembangan keterampilan, peningkatan partisipasi dalam olahraga, dan dukungan manajemen bagi atlet disabilitas (Yulianto, 2024).

Ansell dan Gash menekankan pentingnya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, serta pemahaman kolektif dalam proses kolaboratif. Berdasarkan analisis proses *collaborative governance* di Kabupaten Pati, penerapan tahap-tahap ini sudah terlihat, meskipun perlu diperkuat dengan pelibatan sektor swasta yang lebih luas dan konsistensi pertemuan formal.

Peran PPDI Pada Proses *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Disabilitas Kabupaten Pati

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati telah berperan penting dalam pelaksanaan berbagai program kolaboratif dengan berbagai pihak, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberdayakan para anggotanya (Feradiyah & Prianto, 2024). Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ini berdampak tidak hanya pada individu penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat komunitas secara keseluruhan. Berikut adalah analisis program-program PPDI Pati berdasarkan indikator peran komunitas non-pemerintah dalam *collaborative governance*.

1. Sumber Daya (*Resources*)

PPDI Pati memainkan peran strategis dalam penyediaan sumber daya manusia melalui mobilisasi anggotanya dalam berbagai program kolaboratif, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan partisipasi dalam Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov). Kegiatan ini menunjukkan kapasitas PPDI dalam memobilisasi anggotanya dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dengan 350 anggota dan 10 relawan aktif, PPDI dapat memobilisasi sumber daya manusia secara efektif dalam berbagai kegiatan. Program pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana relawan PPDI memainkan peran penting dalam mendampingi peserta, memastikan mereka dapat mengikuti pelatihan dengan baik (Suratno, 2024).

Dalam pelaksanaan Peparprov 2023, PPDI bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

(Dinporapar) dan NPCI untuk memfasilitasi pelatihan atlet penyandang disabilitas. Kerja sama ini melibatkan pembagian tugas di mana PPDI bertanggung jawab atas pendampingan peserta, sementara Dinporapar menyediakan fasilitas latihan yang sesuai (Yulianto, 2024).

Melalui kegiatan advokasi, PPDI juga memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya terkait aksesibilitas fisik dan hak atas pekerjaan dalam forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati (Wawancara Dimas & Ningsih). Hal ini menegaskan kapasitas sumber daya PPDI tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas keterlibatan mereka.

Merujuk dari

2. Produktivitas (*Productivity*)

PPDI Pati meningkatkan produktivitas pelaksanaan program pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya dan informasi yang dimilikinya. Organisasi ini mempercepat implementasi program dengan mengurangi hambatan teknis dan operasional yang sering dihadapi oleh pihak eksternal. Dalam program pelatihan menjahit tahun 2023, misalnya, relawan PPDI memperlancar pelaksanaan pelatihan dengan memahami kondisi dan kebutuhan khusus peserta. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dan penghematan biaya operasional (Suratno, 2024).

Selain itu, PPDI memainkan peran penting dalam mekanisme evaluasi program. Kedekatan organisasi ini dengan komunitas disabilitas memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan akurat. Laporan yang disusun oleh PPDI mencerminkan kondisi nyata di lapangan dengan lebih baik dibandingkan pihak eksternal, karena PPDI memiliki pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas (Yulianto, 2024). Dalam evaluasi program peningkatan aksesibilitas di ruang publik pada tahun 2022, keterlibatan PPDI membantu mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin tidak terlihat oleh evaluasi formal, sehingga memperkuat efektivitas program tersebut.

3. Informasi (*Information*)

Sebagai organisasi yang berinteraksi langsung dengan komunitas disabilitas, PPDI Pati memiliki akses terhadap informasi strategis mengenai kebutuhan, tantangan, dan peluang bagi penyandang disabilitas. Data primer yang dikumpulkan oleh PPDI dari 350 anggotanya mencakup informasi terkait aksesibilitas, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, serta berbagai kendala yang dihadapi, seperti hambatan infrastruktur dan diskriminasi sosial.

Dalam program pelatihan keterampilan tahun 2023, PPDI mengidentifikasi bahwa hambatan transportasi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh peserta. Berdasarkan temuan ini, PPDI kemudian bekerja sama dengan dinas terkait untuk menyediakan transportasi yang ramah disabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi peserta dalam program tersebut (Suratno, 2024). Informasi strategis ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi program pemberdayaan dan memberikan masukan kepada pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Kedekatan PPDI dengan komunitas disabilitas memungkinkan organisasi ini untuk mendeteksi kebutuhan dan tantangan secara *real-time*, seperti saat pandemi COVID-19, di mana PPDI dapat merespons dengan cepat kebutuhan mendesak anggotanya terkait layanan kesehatan dan bantuan sosial.

4. Legitimasi (*Legitimacy*)

PPDI Pati memiliki peran penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah daerah melalui keterlibatannya yang aktif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Organisasi ini dipercaya oleh para anggotanya dan masyarakat luas karena konsistensi dan keberhasilannya dalam memberikan dukungan moral dan material. Selain itu, PPDI terlibat dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas, pendampingan hukum, dan pelatihan kewirausahaan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu disabilitas (Suratno, 2024).

PPDI juga bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses pembuatan kebijakan. Terlibatnya PPDI dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari komunitas disabilitas. Partisipasi aktif PPDI dalam program seperti ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang lebih inklusif dan responsif (Perda, 2022).

Keterlibatan PPDI juga terlihat dalam program Pemilu 2024, di mana organisasi ini bekerja sama dengan KPU untuk memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah dalam mendukung hak-hak politik penyandang disabilitas.

Dengan demikian, PPDI Pati telah memainkan peran strategis dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati melalui *collaborative governance*, terutama dalam penyediaan sumber daya, produktivitas, akses informasi, dan peningkatan legitimasi pemerintah daerah. Untuk memperkuat kolaborasi ini, diperlukan dukungan tambahan dari pemerintah dalam hal teknis dan pendanaan serta upaya lebih lanjut untuk melibatkan sektor swasta secara aktif. Dengan demikian, keberlanjutan program pemberdayaan penyandang disabilitas dapat terwujud secara optimal.

Dampak Kolaborasi Yang Dilakukan Oleh PPDI Kabupaten Pati

Dalam konteks Kabupaten Pati, pelaksanaan *collaborative governance*, terutama dalam kerja sama antara PPDI dan berbagai dinas serta organisasi lainnya, dapat membawa dampak sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan.

Wawancara dengan Dimas dan Ningsih (2024) mengatakan bahwa; program-program pemberdayaan penyandang disabilitas yang melibatkan PPDI dan berbagai dinas dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas. Dengan hadirnya PPDI Pati informasi yang berkaitan dengan perencanaan program menjadi lebih matang dan tepat sasaran. Selain itu dengan upaya mengkoordinir

para penyandang disabilitas yang menjadi anggota dari PPDI Pati lebih semangat dalam mengikuti program yang dilaksanakan (Dimas & Ningsih, 2024).

2. Legitimasi dan dukungan publik.

Partisipasi aktif PPDI dalam penyusunan kebijakan dan program tidak hanya meningkatkan legitimasi dan dukungan dari komunitas disabilitas tetapi juga dari masyarakat umum. Dengan melibatkan PPDI, kebijakan dan program yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menciptakan rasa memiliki di kalangan anggota PPDI dan mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam implementasi program (Suratno, 2024).

Selain itu, partisipasi PPDI juga membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pembuatan kebijakan. Masyarakat umum melihat bahwa penyandang disabilitas tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai kontributor penting dalam pembangunan. Ini membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta mendorong inklusi sosial yang lebih luas (Dimas & Ningsih, 2024).

3. Kepercayaan antar aktor.

Kolaborasi yang terjalin antara PPDI, dinas-dinas terkait, dan masyarakat tidak hanya membangun kepercayaan yang lebih kuat antar aktor, khususnya antara PPDI, Dinas Sosial, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam mendukung penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Melalui interaksi yang intensif dan dialog terbuka, setiap pihak mampu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mengidentifikasi cara terbaik untuk mendukung satu sama lain (Yasintha, 2020). Proses ini memungkinkan mereka untuk berbagi informasi dan sumber daya secara efektif, baik dalam bentuk bantuan teknis, pendanaan, maupun dukungan logistik. Kolaborasi ini juga menciptakan kesempatan untuk mengevaluasi dan mengembangkan program secara

berkelanjutan, sehingga setiap pihak dapat lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas disabilitas.

Selain itu, kolaborasi ini memfasilitasi penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi lapangan. Dengan partisipasi aktif PPDI yang memiliki kedekatan dengan komunitas disabilitas, program-program yang disusun oleh pemerintah daerah lebih berorientasi pada kebutuhan nyata, seperti peningkatan aksesibilitas ruang publik dan program pelatihan keterampilan yang sesuai. Dinas-dinas terkait juga mendapatkan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, yang seringkali terlewat dalam perencanaan formal. Melalui aliansi ini, bukan hanya tujuan jangka pendek yang tercapai, tetapi juga tercipta pondasi untuk sinergi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan integrasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pati (Yulianto, 2024).

4. Pengelolaan sumber daya.

Pemerintah menyediakan kerangka hukum dan dukungan finansial, komunitas seperti PPDI Pati memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan legitimasi di mata masyarakat. Dengan memadukan kekuatan masing-masing pihak, kolaborasi ini dapat menghasilkan program-program yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berdampak luas. Selain itu, pendekatan ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena setiap pihak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (Suharto, 2017).

Program-program yang dijalankan oleh PPDI Pati secara keseluruhan mencerminkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Berikut adalah pengembangan indikator dampak pemberdayaan dengan mempertimbangkan konteks kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Pati:

a. Meningkatkan kemandirian masyarakat

PPDI Pati mengadakan berbagai program pelatihan keterampilan seperti membatik, kerajinan tangan, dan

kewirausahaan. Dampaknya dapat diukur dari seberapa efektif pelatihan ini dalam menciptakan peluang kerja dan usaha bagi penyandang disabilitas. Program pelatihan yang ditawarkan oleh PPDI, seperti pelatihan keterampilan teknis, vokasional, dan kewirausahaan, berhasil mengembangkan keterampilan baru bagi para anggotanya yang relevan dengan pasar kerja. Sebagai contoh pelatihan keterampilan membuat yang diselenggarakan berhasil meningkatkan ekonomi 5 orang anggota PPDI Pati. Dalam hal ini, Edi Suharto menekankan tentang aspek usaha untuk meningkatkan kemandirian masyarakat (Suharto, 2017).

b. Memperkuat inklusi sosial

PPDI Pati mengadakan berbagai acara sosial, budaya, dan olahraga untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam komunitas yang lebih luas. Salah satu bentuk keterlibatan ini terlihat dari partisipasi anggotanya dalam ajang paralimpik, di mana beberapa anggota berhasil meraih prestasi, menunjukkan potensi dan bakat luar biasa dari komunitas penyandang disabilitas. Selain itu, PPDI Pati juga meningkatkan kesadaran anggotanya akan isu-isu disabilitas dan inklusi sosial melalui kegiatan kolaboratif. Misalnya, kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan untuk menyosialisasikan pemilihan umum, sehingga para anggota dapat lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Aktivitas ini menekankan pentingnya partisipasi aktif sebagai sarana membangun solidaritas dan kekuatan di antara anggota serta masyarakat luas. Melalui keterlibatan yang kuat ini, anggota PPDI tidak hanya memperkuat ikatan internal, tetapi juga turut serta dalam membangun kemandirian dan kontribusi positif di masyarakat, sesuai dengan prinsip inklusivitas dan pengembangan masyarakat yang lebih adil dan mandiri (Muslim, 2007).

c. Meningkatkan asesibilitas

PPDI aktif mendorong pembentukan peraturan yang memastikan fasilitas publik di Kabupaten Pati menjadi lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya ini diwujudkan melalui

komunikasi yang intensif dengan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap kebutuhan aksesibilitas. Dalam beberapa kasus, hasil dari upaya ini sudah mulai terlihat, seperti penyediaan fasilitas ramah disabilitas di Alun-Alun Pati dan Fasilitas Pelayanan Pengadilan Negeri Kabupaten Pati. Adanya fasilitas seperti jalur khusus kursi roda, ramp, dan layanan prioritas menunjukkan langkah awal yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor di Pati (pnpati, 2023).

d. Advokasi dan perlindungan hak

PPDI Pati aktif mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk melalui komunikasi intensif dengan Komisi D DPRD Pati. Upaya ini telah menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Disabilitas, yang menjadi landasan hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Langkah ini tidak hanya menjadi dasar bagi perlindungan hak disabilitas, tetapi juga membentuk arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang lebih inklusif.

Advokasi ini juga memiliki dampak penting bagi penyandang disabilitas, memberikan kepercayaan diri dan menjamin keberadaan mereka dapat diterima di masyarakat. Dengan landasan kebijakan yang kuat, PPDI Pati membantu memperkuat posisi penyandang disabilitas di masyarakat, mendukung terciptanya kesetaraan dan penerimaan yang lebih baik (Mintanawati & Siswanto, 2023).

Jadi, PPDI Pati berperan strategis dalam *collaborative governance* pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Melalui mobilisasi sumber daya manusia, peningkatan produktivitas program, penyediaan informasi strategis, dan penguatan legitimasi, PPDI menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam menciptakan program-program yang inklusif dan berkelanjutan. Organisasi ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penghubung antara komunitas

disabilitas dan pemerintah, memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dalam kebijakan dan program daerah.

D. KESIMPULAN

Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati berjalan dengan cukup efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan komunitas lokal. Peran PPDI sangat signifikan dalam mengumpulkan data, menyediakan sumber daya manusia, dan melakukan advokasi untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Forum-forum kolaboratif yang diadakan bersama dinas terkait memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam proses ini.

Kolaborasi ini berhasil meningkatkan legitimasi pemerintah daerah dalam menangani isu-isu disabilitas dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan. Di sisi lain, keterlibatan aktif PPDI dalam program-program pemberdayaan juga membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal aksesibilitas dan peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Meskipun tantangan terkait partisipasi sektor swasta masih perlu diatasi, *collaborative governance* telah menjadi kerangka kerja yang tepat untuk mencapai inklusi sosial dan pemberdayaan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, L. H. (2016). *Dari disabilitas pembangunan menuju pembangunan disabilitas*. Beeboks Publishing.
- Andra, S. S., & Haryanto. (2023). Kolaborasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak-Hak Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543–571.
- Bungin, B. (2009). Penelitian Kualitatif Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Dimas, & Ningsih. (2024). Komunikasi Pribadi.
- Feradiah, D., & Prianto, A. (2024). Penguatan Peran Pemerintah Melalui Collaborative Governance Dalam Menyediakan Lapangan Kerja Inklusi Di Kabupaten Pasuruan. *Journal Publicubo*, 7(3), 1077–1093.
- Hadari, N. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial* (12 ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Mintanawati, N., & Siswanto, S. (2023). Pendampingan Advokasi Hak Kesehatan Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Lansia Tahun 1965 di FOPPERHAM Yogyakarta. *Al-Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 199–220.
- Muslim, A. (2007). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Aplikasia*, 8(2), 89–103.
- Perda. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas (2022).
- pnpati. (2023). Pengecekan aksesibilitas gedung dan fasilitas disabilitas pada Pengadilan Negeri Pati.
- Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). *Memantau pemenuhan hak-hak disabilitas*. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian
- Suharto, E. (2017). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Cetakan Keenam). Bandung: PT Refika Aditama.
- Suratno. (2024). Wawancara.

Suwarno. (2024). Wawancara.

Undang-Undang, P. (2016). Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23.

Yulianto, E. (2024). Wawancara.